

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

1.1 Tinjauan Pustaka

1.1.1 Penanaman Modal Dalam Negeri

1.1.1.1 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri

Investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 dan Undang-undang No. 12 Tahun 1970 didefinisikan sebagai penggunaan daripada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara, maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha.

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, penanaman modal adalah modal dalam negeri yang diartikan sebagai sumber produktif dari masyarakat Indonesia yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak, benda-benda (bergerak atau tidak bergerak) yang dapat disisihkan atau disediakan untuk menjalankan suatu perusahaan.

Sedangkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal dalam negeri didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa penanaman modal dalam

negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu upaya investasi yang mengarah pada perubahan dalam keseluruhan permintaan dan mempengaruhi siklus bisnis, selain itu investasi mengarah kepada akumulasi modal yang bisa meningkatkan *output* potensial negara dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Samuelson dan Nordhaus, 2003: 136).

1.1.1.2 Komponen-komponen Investasi

Silvia (Sukirno, 2000: 122) menjelaskan investasi dalam praktiknya, meliputi tiga komponen dalam usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam satu tahun tertentu, meliputi pengeluaran/perbelanjaan sebagai berikut:

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Perbelanjaan untuk perumahan, bangunan kantor, pabrik dan lainnya
3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual.

1.1.1.3 Fungsi Penting Kegiatan Investasi

Silvia (Sukirno, 2000: 367) mengungkapkan kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf

kemakmuran masyarakat, peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yaitu:

1. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan seperti ini akan selalu diikuti oleh penambahan dalam kesempatan kerja.
2. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja.
3. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Perkembangan ini memberi sumbangan penting ke atas kenaikan produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa fungsi investasi sangatlah penting karena akan meningkatkan pendapatan nasional yang tentunya akan meningkatkan pula produktivitas dan kesempatan kerja bagi masyarakat.

1.1.1.4 Teori Investasi

Priyono dan Chandra (2016: 64-67) mengungkapkan beberapa teori tentang investasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Teori konvensional (klasik) tentang investasi pada pokoknya didasarkan atas teori produktivitas batas (*marginal productive*) dari faktor produksi modal (*capital*). Berdasarkan teori ini besarnya modal yang akan

diinvestasikan dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya dibandingkan dengan tingkat bunga, sehingga investasi itu akan terus dilakukan bilamana produktivitas batas dari investasi masih lebih tinggi dari tingkat bunga yang akan diterima.

Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai bentuk kekayaan itu memberikan hasil yang berbeda-beda, dan juga mengandung risiko yang tidak sama, maka haruslah dipilih cara mana yang lebih baik, yang menguntungkan dan memberikan kepuasan secara maksimal bagi seorang yang memiliki kekayaan. Pemilik kekayaan harus memilih dan menentukan putusan tentang manakah yang lebih menguntungkan antara membeli saham, obligasi jangka panjang, obligasi jangka pendek, atau diinvestasikan dalam perusahaan.

Berdasarkan teori produktivitas batas, maka soal investasi oleh ahli-ahli ekonomi klasik dipecah atas prinsip-prinsip maksimisasi laba dari perusahaan-perusahaan individual.

Adapun secara garis besar teori klasik tentang investasi adalah sebagai berikut:

- Investasi akan dijalankan bilamana pendapatan dari investasi itu (*prospected yield*) lebih besar dari tingkat bunga. Bila hendak membandingkan antara pendapatan dari investasi dengan suku bunga maka tidak boleh dilupakan bahwa barang-barang modal umumnya mempunyai penggunaan yang panjang dan tidak hanya sekali pakai, sehingga pendapatan dari investasi (yang akan dibandingkan dengan

bunga) adalah terdiri dari jumlah-jumlah pendapatan yang akan diterima setiap akhir tahun, selama penggunaan barang modal itu dalam produksi (umur ekonomis), jumlah pendapatan tiap-tiap tahun selanjutnya dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku sekarang.

- Investasi dalam suatu barang modal adalah menguntungkan bilamana biaya (ongkos) plus bunga lebih kecil dari hasil pendapatan yang diharapkan dari investasi itu. Dengan demikian unsur-unsur yang diperhitungkan dalam penentuan investasi adalah: (1) tingkat ongkos (biaya) atas modal; (2) tingkat bunga; dan (3) tingginya hasil pendapatan yang diterima. Berubahnya salah satu dari ketiga faktor diatas, akan mengakibatkan berubahnya perhitungan profitabilitas.

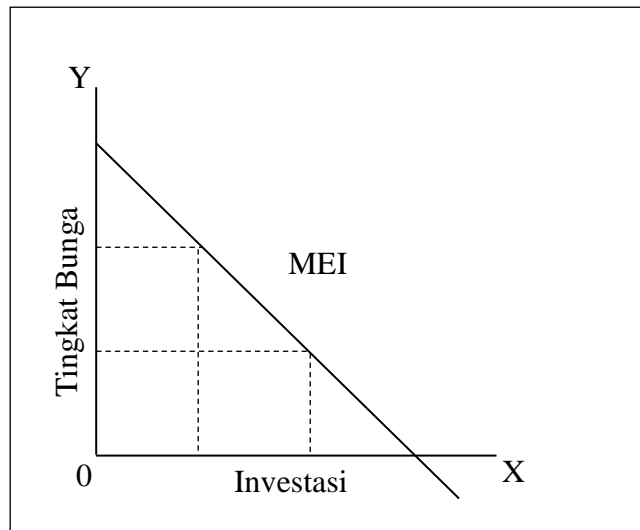
2. Teori Keynes

Menurut pandangan Keynes, masalah investasi, baik penentuan jumlah maupun kesempatan untuk melakukan investasi didasarkan atas konsep *Marginal Efficiency of Investment* (MEI). Dengan mendasarkan atas konsep pemikiran tersebut investasi akan dilaksanakan apabila MEI masih lebih tinggi daripada tingkat bunga.

Secara grafis MEI ini digambarkan sebagai suatu kurva yang menurun, kurva ini menggambarkan jumlah investasi yang akan terlaksana pada setiap tingkat bunga. Menurunnya tingkat kurva MEI ini antara lain disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- Bahwa semakin banyak jumlah investasi yang terlaksana dalam masyarakat, semakin rendahnya MEI itu.

- Semakin banyak investasi dilakukan, maka ongkos dan barang modal (aset) menjadi lebih tinggi.



Gambar 2.1 Kurva *Marginal Efficiency of Investment* (MEI)

Sumber: Priyono & Chandra, T. (2016). *Esensi Ekonomi Makro*.
Sidoarjo: Zifatama Publisher

Menurut teori Keynes tentang investasi, pertimbangan pokok untuk terlaksananya investasi adalah faktor efisiensi marginal dari investasi itu sendiri. Efisiensi marginal dari investasi ini sangat tergantung pada perkiraan-perkiraan dan perhitungan pengusaha terhadap perkembangan situasi ekonomi masa depan. Oleh karena itu, tingkat MEI tidak dapat ditentukan dengan pasti.

Pandangan hari kedepan bagi pengusaha dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor-faktor ekonomi maupun faktor-faktor psikologis. Menghubungkan antara pengusaha dengan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan investasi.

3. Teori Akselerasi

Digdowaiseso (2016: 61-66) menjelaskan adanya teori akselerasi yang awalnya dikemukakan oleh Bickerdike dan J.M. Clark pada tahun 1910-an dan menjadi semakin populer setelah Keynes menerbitkan bukunya *The General Theory*. Teori akselerasi merupakan teori investasi dengan didasarkan pada hubungan yang kaku diantara jumlah barang modal (*capital stock*) dengan tingkat pendapatan nasional yang dapat dihasilkan. Menurut teori ini, rasio antara nilai stok modal dengan nilai produksi yang dapat dihasilkan adalah tetap.

Pandangan utama dari teori akselerasi dapat dinyatakan dalam dua rumusan, yaitu: (i) terdapat hubungan yang proporsional diantara jumlah barang modal yang tersedia dengan tingkat produksi nasional yang dapat dihasilkan, dan (ii) kebutuhan untuk meningkatkan produksi dimasa depan memerlukan investasi yang beberapa kali nilainya dari peningkatan produksi yang perlu dilakukan. Aspek kedua dari pandangan ini menyebabkan teori investasi ini lebih dikenal sebagai prinsip akselerasi atau prinsip percepatan.

Investasi merupakan suatu kegiatan untuk menambah barang modal dalam perekonomian. Meskipun demikian, pada setiap periode investasi tidak akan menambah barang modal sebanyak nilai investasi tersebut. Sebagian dari investasi dilakukan untuk menggantikan barang modal yang telah diapresiasi dan tidak digunakan lagi. Dengan demikian,

pertambahan barang modal dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$K_t = I_t - D_t$$

Dimana:

K_t adalah pertambahan nilai modal dalam tahun t .

I_t adalah investasi pada tahun t .

D_t adalah nilai barang modal yang didepresiasi pada tahun t .

Investasi yang berlaku pada suatu tahun tertentu (I_t) biasanya lebih besar dari depresiasi yang berlaku (D_t). Sebagai akibatnya, investasi yang terus menerus dilakukan pada masa lalu akan menyebabkan suatu akumulasi stok modal tertentu, yaitu pada tahun t nilai stok modal tersebut adalah K_t . Kemampuan stok modal ini akan menghasilkan produksi nasional ditentukan oleh rasio modal produksi, yaitu W . Dengan demikian hubungan diantara stok modal (K_t) dan produksi nasional yang dapat diciptakan (Y_p) dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$K_t = WY_p$$

Bagaimana suatu perekonomian perlu melakukan investasi itu bergantung kepada keinginan masyarakat untuk melakukan perbelanjaan di masa depan. Apabila perbelanjaan agregat pada masa $(t + 1)$ melebihi Y_p , yang diperlukan hanyalah investasi untuk menggantikan modal yang didepresiasi. Sebaliknya, apabila perbelanjaan agregat dimasa depan jauh di bawah Y_p (yaitu perekonomian resesi yang serius) investasi untuk menggantikan barang modal yang didepresiasi juga tidak diperlukan.

1.1.2 Tenaga Kerja

1.1.2.1 Pengertian Tenaga Kerja

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan menurut Mulyadi (2003: 57) tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa tenaga kerja diidentikan dengan seseorang yang mampu melakukan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk masyarakat.

Batas usia kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia yaitu minimal 15 tahun dengan maksimal umur 64 tahun. Jumlah tenaga kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Tenaga kerja berperan aktif sebagai salah satu sektor faktor produksi dalam perkembangan ekonomi terutama pada sektor industri yang banyak berorientasi kepada sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja.

1.1.2.2 Jenis-jenis Tenaga Kerja

Badan Pusat Statistik membagi jenis-jenis tenaga kerja menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Tenaga kerja penuh (*full employed*) adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja ≥ 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai uraian tugas.
2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam dalam seminggu.
3. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja adalah tenaga kerja yang bekerja dengan jam kerja ≤ 1 jam dalam seminggu.

1.1.2.3 Teori Ekonomi Sumber Daya Manusia

Mulyadi (2019: 4-9) mengungkapkan beberapa teori tentang ketenagakerjaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Teori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini, teori klasik Adam Smith (1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang

efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

2. Teori Malthus

Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Buku Malthus yang paling dikenal yaitu *Principles of Population*. Dari buku tersebut akan dilihat bahwa meskipun Malthus termasuk salah seorang pengikut Adam Smith, tidak semua pemikirannya sejalan dengan pemikiran Smith. Disatu pihak Smith optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi. Sebaliknya, Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia. Kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama tetap jumlahnya. Dalam banyak hal justru luas tanah untuk pertanian berkurang karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik dan bangunan lain serta pembuatan jalan. Menurut Malthus manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Malthus tidak percaya bahwa teknologi mampu berkembang lebih cepat dari jumlah penduduk sehingga perlu dilakukan pembatasan dalam jumlah penduduk. Pembahasan ini disebut Malthus sebagai pembatasan moral.

3. Teori Keynes

Kaum Klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (*equilibrium*). Dalam posisi keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (*full-employed*). Dengan demikian dibawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Jika tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kesiediaan untuk bekerja dengan tingkat upah lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk mempekerjakan mereka lebih banyak.

Kritikan John Maynard Keynes (1883-1946) terhadap sistem klasik salah satunya adalah tentang pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja penuh. Dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik diatas. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan pekerja dari penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan, maka boleh jadi tingkat pendapatan masyarakat akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan akan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga.

Jika harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marginal tenaga kerja (*marginal value productivity of labor*), yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam mempekerjakan tenaga kerja akan turun. Jika penurunan dalam harga-harga tidak begitu besar, maka kurva nilai produktivitasnya hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga kerja yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah lagi jika harga-harga turun drastis maka kurva nilai produktivitas marginal dari tenaga kerja juga turun drastis dimana jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin bertambah luas.

1.1.3 Inflasi

1.1.3.1 Pengertian Inflasi

Menurut Firdaus (2011: 115) inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang-barang pada umumnya secara terus menerus yang disebabkan oleh karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan barang dan jasa yang tersedia. Sedangkan menurut Hasyim (2016: 186) inflasi merupakan gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum yang berkesinambungan, syarat inflasi yaitu terjadi kenaikan harga-harga secara terus menerus.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus. Namun, apabila kenaikan harga terjadi dalam waktu singkat, misalnya kenaikan secara musiman menjelang hari raya Idul Fitri, tahun baru, dan lainnya belum dapat dikatakan sebagai inflasi

karena setelah berakhirnya musim tersebut biasanya harga akan kembali menjadi normal.

1.1.3.2 Jenis-jenis Inflasi

Menurut Firdaus (2011: 119) berdasarkan tingkat intensitasnya inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut:

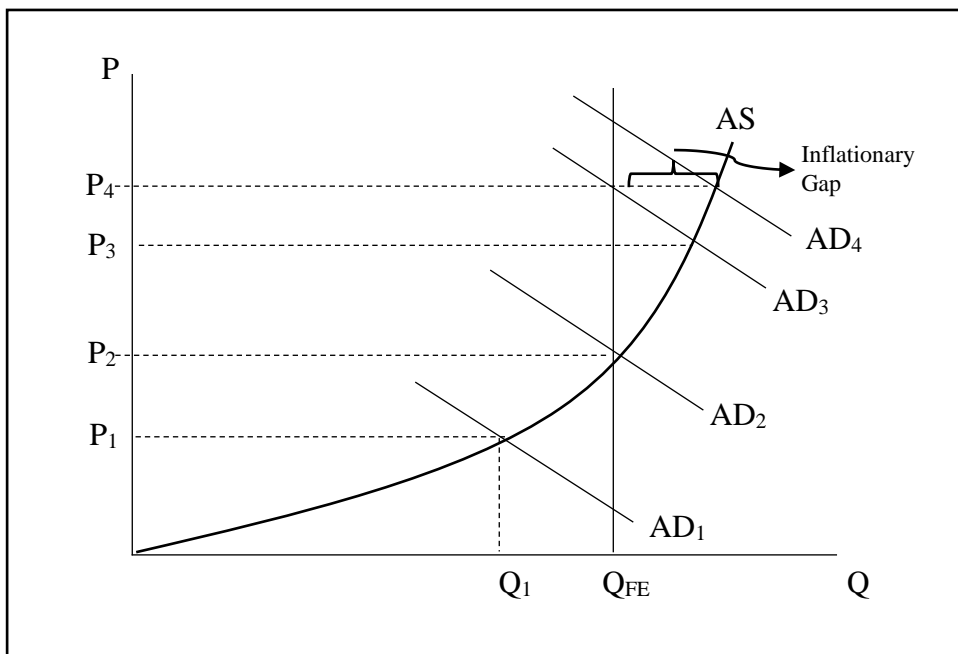
1. Inflasi ringan, yaitu inflasi yang kurang dari 10% pertahun.
2. Inflasi sedang, yaitu inflasi diantara 10% sampai 30% pertahun.
3. Inflasi berat, yaitu inflasi diantara 30% sampai 100% pertahun.
4. Hiperinflasi, yaitu inflasi yang lebih dari 100% pertahun.

Berdasarkan sumbernya, inflasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Inflasi karena tarikan permintaan (*demand pull inflation*)

Inflasi ini terjadi karena tingginya permintaan, sementara barang tidak tersedia dengan cukup. Inflasi ini biasanya berlaku ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan pesat. Selain itu, inflasi ini juga berlaku pada masa pertumbuhan yang pesat dan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi, masa perang atau ketidakpastian politik. Dalam masa ini, biasanya pemerintah berbelanja jauh melebihi pendapatannya. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendesak uang baru atau meminjam dari bank-bank umum serta lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pengeluaran pemerintah yang lebih tersebut akan meningkatkan permintaan agregat dengan cepat. Apabila produsen

tidak dapat memenuhi permintaan agregat tersebut, maka akan terjadi kenaikan harga-harga.



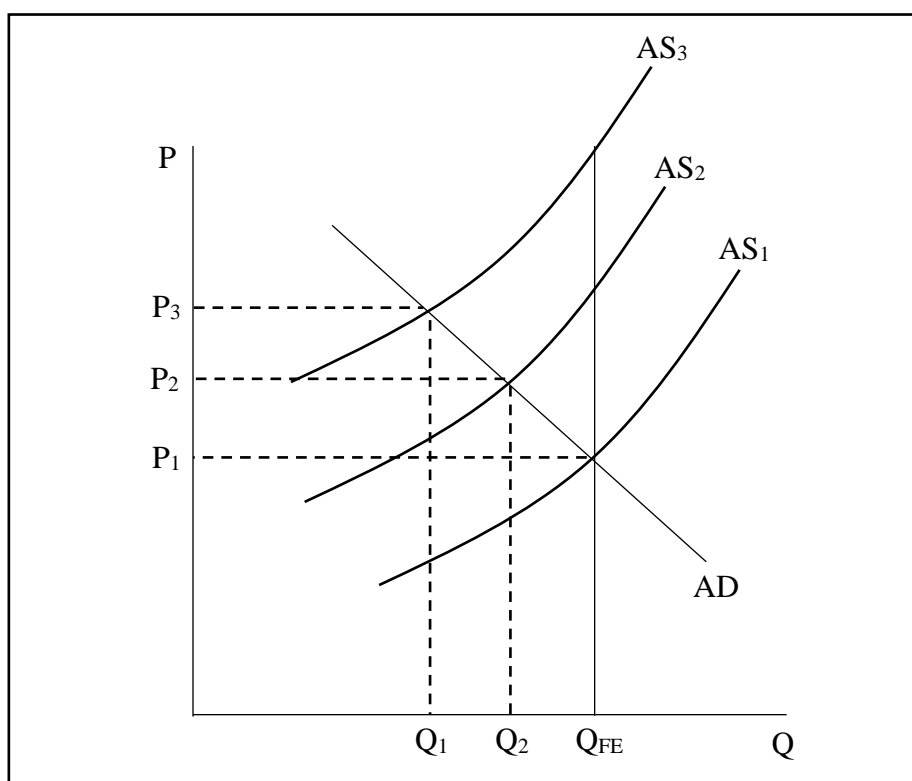
Gambar 2.2 Demand Pull Inflation

Sumber: Natsir, M. (2012). *Ekonomi Moneter Teori & Kebijakan*. Semarang: Penerbit Polines Semarang

Analisis terhadap Gambar 2.2 diatas dimulai dari tingkat harga (P_1) dan *output* (Q_1), jika terjadi kenaikan permintaan total dari AD_1 menjadi AD_2 akan menyebabkan adanya sebagian dari permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh penawaran yang ada. Akibatnya, harga akan meningkat dari P_1 menjadi P_2 dan *output* meningkat menjadi Q_{FE} . Kenaikan harga tersebut disebabkan karena adanya *inflationary gap*. Jika perekonomian dalam posisi *inflationary gap*, maka PDB aktual lebih besar dari PDB potensial, akibatnya harga-harga akan meningkat (inflasi).

2. Inflasi karena dorongan biaya (*cost push inflation*)

Inflasi ini terjadi karena biaya atau harga faktor produksi meningkat. Akibatnya, produsen harus menaikkan harga supaya mendapatkan laba dan produksi bisa terus berlangsung. Biasanya inflasi dorongan biaya berlaku ketika perekonomian hampir atau telah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kenaikan harga-harga tersebut bersumber dari salah satu kombinasi dari tiga faktor berikut: para pekerja dalam perusahaan menuntut kenaikan upah, harga barang baku atau bahan penolong yang digunakan perusahaan bertambah tinggi, serta dalam perekonomian yang sedang mengalami perkembangan pesat.



Gambar 2.3 Cost Push Inflation

Sumber: Natsir, M. (2012). *Ekonomi Moneter Teori & Kebijakan*. Semarang: Penerbit Polines Semarang

Analisis Gambar 2.3 diatas diawali dari tingkat harga P_1 dan Q_{FE} , jika terjadi kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh berhasilnya tuntutan kenaikan upah oleh serikat buruh dan kenaikan harga bahan baku akan menggeser kurva penawaran total AS_1 menjadi AS_2 . Akibatnya, harga akan naik menjadi P_2 dan produksi akan turun menjadi Q_1 .

Inflasi menurut sumber atau asalnya, yaitu:

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Inflasi jenis ini timbul karena defisit anggaran pemerintah yang dibiayai oleh pencetakan uang baru (yang menyebabkan jumlah uang naik) atau karena gagal panen (persediaan barang menurun).

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

Inflasi jenis ini timbul karena kenaikan harga barang-barang di luar negeri yang menjadi rekan dagang negara yang barang-barangnya diimpor.

2.1.3.3 Kriteria Inflasi

Menurut Nopirin (2012: 27) kriteria inflasi dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Inflasi Merayap (*Creeping Inflation*)

Inflasi ini ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% pertahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

2. Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*)

Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (tingkat keparahan diantara 10% - 30% dalam satu tahun) dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi (harga dalam waktu mingguan atau bulanan) efeknya terhadap perekonomian lebih besar daripada inflasi merayap (*creeping inflation*).

3. Inflasi Tinggi (*Hyper Inflation*)

Inflasi ini merupakan inflasi yang paling parah akibatnya (tingkat keparahan diatas 100% dalam satu tahun). Harga-harga naik sampai lima atau enam kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam, sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh perang) yang dibelanjai/ditutup dengan mencetak uang.

2.1.3.4 Teori Inflasi

Boediono (1998: 169-172) memaparkan beberapa teori tentang inflasi, diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Kuantitas

Teori ini menyoroti hal-hal yang berperan dalam proses inflasi, yaitu jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Inti dari teori kuantitas adalah sebagai berikut: Inflasi hanya bisa terjadi apabila ada penambahan volume uang yang beredar. Tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar gagal panen misalnya hanya akan

menaikan harga-harga untuk sementara waktu saja. Penambahan jumlah uang ibarat “bahan bakar” bagi api inflasi. Apabila jumlah uang bertambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya. Laju inflasi disebabkan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan anggapan masyarakat mengenai harga-harga.

Disetiap transaksi, jumlah yang dibayarkan oleh pembeli sama dengan jumlah uang yang diterima penjual. Hal ini berlaku untuk seluruh perekonomian. Dalam periode tertentu nilai barang dan jasa yang dibeli harus sama dengan nilai barang dan jasa yang dijual. Barang yang dijual sama dengan volume transaksi dikalikan harga rata-rata barang tersebut.

Teori kuantitas ini dikemukakan oleh Irving Fisher. Beliau juga merumuskan teorinya dalam bentuk persamaan, yaitu:

$$MV = PT$$

Dimana:

M = Penawaran uang

V = Perputaran uang

P = Tingkat harga

T = Volume barang yang diperdagangkan dalam suatu tahun tertentu

Menurut Fisher, nilai V ditentukan oleh kebiasaan pembayaran gaji dan efisiensi lembaga keuangan. Oleh karena faktor-faktor ini tidak selalu berubah, nilai V relatif tetap. Pada suatu periode tertentu, kuantitas barang yang diperdagangkan T jumlahnya tertentu. Dalam keseimbangan (*full employment*) nilai T adalah tetap dan telah mencapai tingkat yang

maksimum. Berdasarkan keyakinan bahwa nilai V dan T adalah tetap, ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang hanya akan mempengaruhi tingkat harga.

2. Teori Keynes

Menurut John Mayard Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan terjadi *inflationary gap* atau celah inflasi. Celah inflasi ini timbul karena golongan-golongan masyarakat berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif terhadap barang. Golongan-golongan masyarakat yang dimaksud yaitu pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh. Pemerintah berusaha memperoleh bagian lebih besar dari *output* masyarakat dengan cara mencetak uang baru. Pengusaha melakukan investasi dengan modal yang diperoleh dari kredit bank, serikat buruh atau pekerja memperoleh kenaikan harga. Hal ini terjadi karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia, maka harga-harga akan naik. Adanya kenaikan harga-harga ini menunjukkan sebagian dari rencana-rencana pembelian barang dari golongan-golongan tersebut bisa dipenuhi. Proses inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari semua golongan masyarakat melebihi jumlah output yang dihasilkan. Namun, apabila permintaan efektif total tidak melebihi

harga-harga yang berlaku dari jumlah *output* yang tersedia, maka inflasi akan berhenti.

3. Teori Struktural

Teori ini didasarkan pada hasil dari studi yang dilakukan terhadap negara berkembang. Hasilnya menunjukkan bahwa inflasi bukan merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau *cost push inflation*. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi negara-negara berkembang yang pada umumnya masih bercorak agraris. Sehingga, guncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri misalnya gagal panen (akibat faktor eksternal pergantian musim yang terlalu cepat, bencana alam, dan sebagainya), atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri, misalnya memburuknya *term of trade* utang luar negeri dan kurs valuta asing, dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik.

1.1.4 Suku Bunga

1.1.4.1 Pengertian Suku Bunga

Menurut Mishkin (2010: 113) suku bunga didefinisikan sebagai biaya hutang atau harga yang harus dibayar atas peminjaman dana. Adapun menurut Sunariyah (2011: 82), tingkat suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan satu ukuran harga sumber yang digunakan oleh debitur yang dibayarkan kepada debitur. Unit waktu biasanya dinyatakan dalam satuan tahun (satu tahun investasi) atau bisa lebih pendek dari satu tahun. Suku bunga pada dasarnya mempunyai dua pengertian sesuai peninjaunya yaitu bagi bank dan bagi pengusaha. Bagi bank, bunga merupakan suatu pendapatan atas

peminjaman uang oleh nasabah atau pengusaha. Sedangkan bagi pengusaha, bunga dianggap sebagai biaya modal atau ongkos produksi.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suku bunga merupakan harga yang harus dibayar oleh peminjam berdasarkan persentase yang sudah disepakati.

Suku bunga dasar yang diterapkan di Indonesia yaitu Bank Indonesia *Rate* atau disingkat *BI Rate*. *BI Rate* merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. *BI Rate* digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan suku bunga SBI 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada disekitar *BI Rate* (Panorama, 2016: 108). Pergerakan *BI Rate* digunakan sebagai acuan suku bunga lain seperti Pasar Uang Antar Bank (PUAB), suku bunga pinjaman, dan suku bunga lainnya dalam jangka panjang, sehingga jika *BI Rate* naik maka suku bunga yang lain pun juga akan naik, begitupun sebaliknya.

1.1.4.2 Fungsi Suku Bunga

Suku bunga memberikan sebuah keuntungan dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak lain atas dasar perhitungan waktu dan nilai ekonomis. Tinggi rendahnya keuntungan ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga. Menurut Sunariyah (2013: 81) fungsi suku bunga dalam perekonomian yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai daya tarik investor untuk menginvestasikan dananya.

2. Tingkat bunga dapat digunakan sebagai alat kontrol bagi pemerintah terhadap dana langsung atau investasi pada sektor-sektor ekonomi.
3. Tingkat suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian.

1.1.4.3 Teori Suku Bunga

Iswandi (2017:638-639) mengatakan ada beberapa teori mengenai suku bunga yaitu:

1. Teori Bunga Klasik

Menurut teori klasik, bunga adalah harga dari penggunaan pinjaman atau harga yang terjadi dipasar dana investasi dalam suatu periode tertentu. Dalam pasar dana investasi, kelompok penabung adalah anggota masyarakat yang dalam suatu periode tertentu mempunyai kelebihan dana. Kelompok kedua yaitu para investor yang dalam periode yang sama membutuhkan dana untuk investasi atau para pengusaha yang ingin memperluas usahanya. Para penabung dan investor bertemu dan dari proses tawar menawar akan menghasilkan tingkat bunga keseimbangan. Bilamana terjadi kondisi tingkat bunga dalam keseimbangan, artinya tidak ada dorongan untuk menabung akan sama dengan dorongan pengusaha untuk melakukan investasi. Teori bunga aliran klasik dinamakan "*The Pure Theory of Interest*".

2. Teori Keynes

Teori ini dikemukakan oleh Keynes dan dinamakan “*Liquidity Preference Theory of Interest*”. Menurut Keynes tingkat bunga ditentukan oleh *preference* dan *supply of money*. *Liquidity preference* adalah keinginan memegang atau menahan uang didasarkan tiga alasan yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Permintaan uang mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat bunga. Hubungan yang negatif antara permintaan uang dengan tingkat bunga ini dapat diterangkan Keynes, dia mengatakan bahwa masyarakat mempunyai pendapat tentang adanya tingkat bunga nominal (*natural rate*). Bilamana tingkat bunga turun dari tingkat bunga nominal dalam masyarakat ada suatu keyakinan memegang obligasi pada saat suku bunga naik (harga obligasi mengalami penurunan) pemegang obligasi tersebut akan menderita kerugian (*capital loss*). Guna menghindari kerugian ini, tindakan yang dilakukan adalah menjual obligasi dengan sendirinya akan mendapatkan uang kas, dan uang kas ini yang akan dipegang pada saat suku bunga naik. Hubungan inilah yang disebut motif spekulasi permintaan uang karena masyarakat akan melakukan spekulasi tentang obligasi dimasa yang akan datang.

1.1.5 Penelitian Terdahulu

Pada Tabel 2.1 akan diuraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung terhadap penelitian ini. Melalui penelitian terdahulu dapat

diketahui pengaruh antar variabel x dan y yang telah diuji pada penelitian sebelumnya dan dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun) dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Azar Fuadi (2013) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Tengah Periode 1985-2010	Inflasi, suku bunga, dan penanaman modal dalam negeri	PDRB	Hubungan dan pengaruh suku bunga adalah negatif signifikan sedangkan PDRB dan inflasi terhadap penanaman modal dalam negeri adalah positif signifikan.	<i>Economics Development Analysis Journal</i> Vol 3 No 3 (2014) ISSN 2252-6560
2	Komang Sri Ayu Puspita Dewi dan Luh Gede Meydianawathi (2016) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Bali	Suku bunga dan penanaman modal dalam negeri	Jumlah kunjungan wisatawan, kebijakan otonomi daerah, dan PDRB	Hubungan dan pengaruh suku bunga adalah negatif signifikan sedangkan PDRB, jumlah kunjungan wisatawan, dan kebijakan otonomi daerah terhadap penanaman modal dalam negeri adalah positif signifikan.	E-JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS UDAYANA Vol.6, No.4 April 2017 Hal. 622-647 ISSN 2303-0178
5.	Salman Alfarisi (2011) Analisis Pengaruh Suku Bunga Kredit dan Krisis Ekonomi terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia Tahun 1990-2010	Suku bunga dan penanaman modal dalam negeri	Krisis ekonomi	Hubungan dan pengaruh suku bunga adalah negatif signifikan sedangkan krisis ekonomi terhadap penanaman modal dalam negeri adalah positif signifikan.	Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 9 No. 2 Desember 2011 Hal. 197-206 ISSN 1693-2595

No.	Peneliti (Tahun) dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Sinjo James Laoh (2014) Analisis Pengaruh Indikator Makroekonomi terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia Periode 2003 – 2012	Suku bunga, inflasi, dan penanaman modal dalam negeri	Nilai tukar dan PDB	Hubungan dan pengaruh suku bunga dan inflasi adalah negatif signifikan sedangkan PDB adalah positif signifikan tetapi nilai tukar terhadap penanaman modal dalam negeri adalah positif tidak signifikan.	<i>Journal of Business and Economics</i> Desember 2014 Vol. 13 No. 2 Hal. 153 – 169 ISSN 1412-0070
7.	Dadang Sudirman (2017) Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Ekspor dan Inflasi terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kalimantan Tengah	Inflasi, tenaga kerja, dan penanaman modal dalam negeri	Ekspor	Hubungan dan pengaruh tenaga kerja, inflasi dan, ekspor terhadap penanaman modal dalam negeri adalah positif signifikan.	AL – ULUM JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA Volume 3, Nomor 1, April 2017 Hal. 343-357 ISSN 2476 – 9576
8.	Engla Desnim Silvia (2018) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Barat	Suku bunga dan penanaman modal dalam negeri	PDRB dan keamanan	Hubungan dan pengaruh PDRB, suku bunga, dan keamanan adalah positif signifikan terhadap penanaman modal dalam negeri adalah positif signifikan.	Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018 Hal. 127-137 p-ISSN 2599-0985 e-ISSN 2622-1918
9.	Chandra Tarigan, Tri Oldy Rotinsulu, dan Krest D. Tolosang (2021) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi PMDN di Provinsi Sulawesi Utara Pada Tahun 2003-2018	Inflasi, suku bunga, tenaga kerja, dan penanaman modal dalam negeri	-	Hubungan dan pengaruh suku bunga dan inflasi adalah positif tidak signifikan sedangkan tenaga kerja terhadap penanaman modal dalam negeri adalah positif signifikan.	Jurnal EMBA Vol.9 No.2 April 2021, Hal. 516-522 ISSN 2303-1174

No.	Peneliti (Tahun) dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Sri Wahyuning dan Sindhu Rakasiwi (2014) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri di Propinsi Jawa Tengah	Inflasi dan penanaman modal dalam negeri	Angkatan kerja, PDRB, dan infrastruktur	Hubungan dan pengaruh PDRB adalah negatif signifikan dan inflasi adalah negatif tidak signifikan sedangkan angkatan kerja dan infrastruktur terhadap penanaman modal dalam negeri adalah positif signifikan.	Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi Vol 7, No 2 (2014) e-ISSN 2621-6248
11.	Samuel Richard Messakh dan Paulina Yuritha Amtiran (2019) Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Investasi Dalam Negeri di Indonesia	Inflasi, suku bunga, dan penanaman modal dalam negeri	-	Hubungan dan pengaruh suku bunga adalah negatif signifikan sedangkan inflasi terhadap penanaman modal dalam negeri adalah positif tidak signifikan.	JOURNAL OF MANAGEMENT (SME's) Vol. 8, No.1, 2019, Hal. 1-15 ISSN 2502-2385 e-ISSN 2723-469X
12.	Eni Setyowati dan Siti Fatimah NH (2007) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri di Jawa Tengah Tahun 1980-2002	Tenaga kerja, inflasi, suku bunga, dan penanaman modal dalam negeri	PDRB	Hubungan dan pengaruh suku bunga adalah negatif signifikan sedangkan tenaga kerja, inflasi, dan PDRB terhadap penanaman modal dalam negeri adalah positif signifikan.	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No.1, Juni 2007, hal 62-84 ISSN 1411-6081 e-ISSN 2460-9331

No.	Peneliti (Tahun) dan Judul	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Ferdila Dedy Utomo (2017) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PMDN di Jawa Tengah	Tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri	Pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit	Hubungan dan pengaruh pengeluaran pemerintah dan suku bunga kredit adalah negatif tidak signifikan sedangkan tenaga kerja terhadap penanaman modal dalam negeri adalah positif signifikan.	Economics Development Analysis Journal 6 (2) (2017) hal. 165-169 ISSN 2252-6560 e-ISSN 2502-2725
14.	Yani Rizal (2018) Analisis Pengaruh Tenaga Kerja dan Kurs terhadap Investasi Dalam Negeri	Tenaga kerja dan penanaman modal dalam negeri	Kurs	Hubungan dan pengaruh tenaga kerja dan kurs terhadap penanaman modal dalam negeri adalah positif signifikan.	JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA, VOL. 2, NO. 1, APRIL 2018 Hal.30-37 ISSN 2549-4104 e-ISSN 2685-4287

1.2 Kerangka Pemikiran

1.2.1 Hubungan Antara Tenaga Kerja dengan Penanaman Modal Dalam Negeri

Jumlah tenaga kerja di suatu daerah akan mempengaruhi penanaman modal dalam negeri di daerah tersebut. Semakin banyaknya jumlah tenaga kerja, maka nilai PMDN di suatu daerah akan meningkat. Hal ini didasari karena tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama yang berperan aktif dalam peningkatan kapasitas produksi yang nantinya akan membuat peningkatan pula pada PMDN. Sehingga hubungan tenaga kerja dengan PMDN adalah positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Dadang Sudirman (2017) dengan judul Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Ekspor dan Inflasi terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kalimantan Tengah menyatakan bahwa hubungan antara

tenaga kerja dengan PMDN adalah positif. Sehingga ketika tenaga kerja meningkat, maka PMDN pun meningkat.

1.2.2 Hubungan Antara Inflasi dengan Penanaman Modal Dalam Negeri

Inflasi di suatu daerah akan mempengaruhi penanaman modal dalam negeri di daerah tersebut. Ketika tingkat inflasi tinggi, maka PMDN di suatu daerah akan menurun. Hal ini didasari karena berkurangnya pengembalian atau keuntungan investasi sehingga minat investor untuk berinvestasi menurun. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang investor akan cenderung melakukan investasi apabila tingkat inflasi stabil dan tingkat harga barang-barang secara umum tidak akan mengalami kenaikan dalam jumlah yang signifikan (Laoh, 2014: 159). Sehingga hubungan antara inflasi dengan PMDN adalah negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Frisnawati Yunus, Rostin, dan Wali Aya Rumbia (2019) dengan judul Determinan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia menyatakan bahwa hubungan antara inflasi dengan PMDN adalah negatif. Sehingga ketika inflasi meningkat, maka nilai PMDN menjadi menurun.

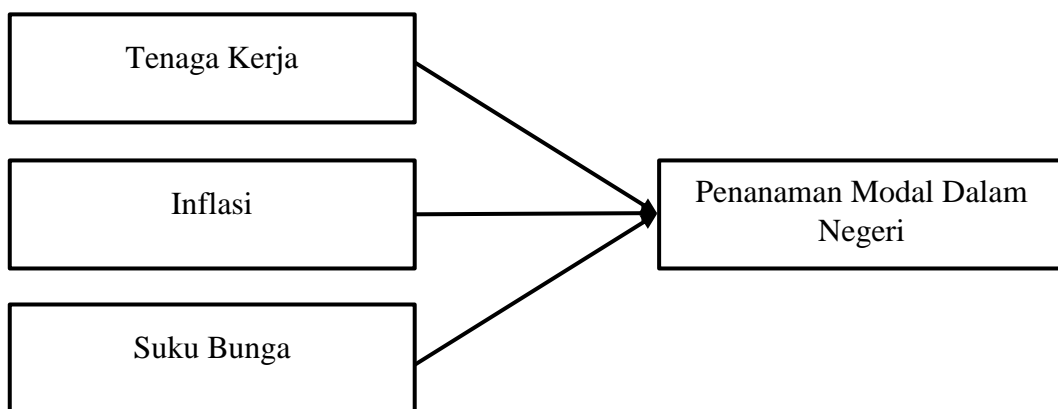
1.2.3 Hubungan Antara Suku Bunga dengan Penanaman Modal Dalam Negeri

Tingkat suku bunga akan mempengaruhi penanaman modal dalam negeri di suatu daerah. Ketika tingkat suku bunga tinggi, maka nilai PMDN di suatu daerah menurun. Hal ini didasari karena investasi merupakan fungsi dari suku bunga,

dimana $I = f(i)$. Ketika tingkat suku bunga (i) naik, maka investasi (I) akan menurun. Sehingga hubungan antara suku bunga dan PMDN adalah negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Komang Sri Ayu Puspita Dewi dan Luh Gede Meydianawathi (2016) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Bali menyatakan bahwa hubungan antara suku bunga dan PMDN adalah negatif. Sehingga ketika suku bunga meningkat, maka nilai PMDN menjadi menurun.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, hubungan antara tenaga kerja, inflasi, dan suku bunga dengan penanaman modal dalam negeri digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

1.3 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Diduga tenaga kerja berpengaruh positif sedangkan inflasi dan suku bunga berpengaruh negatif secara parsial terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2020.
2. Diduga tenaga kerja, inflasi, dan suku bunga berpengaruh secara bersama-sama terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2020.